

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi. Militer merupakan salah satu organ yang penting di miliki oleh pemerintah dalam suatu Negara. Tujuan pokok adanya militer dalam satu negara seperti yang dikatakan Finer, untuk bertempur dan memenangkan peperangan. Guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Hakekat tugas militer yang sebenarnya dalam suatu negara ialah melatih diri dan menyediakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, mereka (golongan militer) yang harus bertanggung jawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum terhadap ancaman musuh dari luar (Muhaimin, 2005:1) Militer merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisasi dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang dibedakan dari orang-orang sipil (Masa demokrasi liberal berdasarkan sistem multipartai yang banyak memiliki segi positif dan juga memiliki segi negatif.

Dalam periode 1950-1959 yang disebut sebagai Demokrasi Liberal merupakan zaman keemasan kehidupan partai-partai politik di Indonesia. Suatu masa dimana dalam sejarah perjalanan partai-partai politik yang penuh kegairahan dan dinamika. Boleh dikatakan hampir dalam struktur kenegaraan diperebutkan oleh “orang orang partai” karena menganut sistem pemerintahan Parlementer. Kursi-kursi di pemerintahan diperebutkan oleh partai-partai politik yang lebih banyak memunculkan perbedaan

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendapat daripada menghasilkan rumusan-rumusan konstruktif demi kepentingan nasional. Sedangkan Soekarno lebih banyak sebagai pengendali pemerintah di atas pertentangan antar partai. Posisi golongan tentara berjajar menjadi “penonton” serta bertugas sebagai pelaksana setiap kebijaksanaan pemerintah. Agenda sidang kabinet banyak berisi tentang pertikaian kepentingan yang begitu tajam antar partai politik. Keadaan ini terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Seringnya pergantian kabinet karena perbedaan pendapat antara partai, banyak menimbulkan kejengkelan golongan tentara, sehingga sering pula pihak tentara menunjukkan sikap yang keras dan menentang kebijaksanaan kabinet. Melihat gejolak pemerintahan dalam sistem parlementer nampak bahwa tentara merasa terombang ambing oleh sikap para pemimpin sipil dari partai-partai yang boleh di bilang “kurang becus memegang kursi parlemen dan kabinet” dalam situasi yang demikian golongan tentara nampak aktif mengikuti terus jalannya politik, tetapi tidak melakukan tindakan.

Ketika revolusi berakhir dan negara harus dibangun kembali, banyak diantara perwira Angkatan Darat (AD) yang sulit menerima kenyataan bahwa mereka harus mundur di latar belakang kehidupan negara. Di samping itu, sejak tahun 1950 mereka masih meneruskan perjuangan untuk menumpas berbagai pemberontakan dan gangguan dalam negeri. Dilain pihak kekhawatiran mereka menyaksikan manajemen negara yang sangat tidak efisien oleh pemerintahan sipil yang korup dalam pemerintahan.

Menurut Lev (1996:6) dalam Nasution (2009:281) menyebutkan

“Mereka mengancam perpecahan nasional, kekacauan ideologi pertikaian politik, cara kerja yang tidak efisien birokratisme, korupsi dan kurangnya kesepakatan yang menjadi sangat nyata sejak peralihan kekuasaan; dan penataan oleh

pemerintah sipil dituduh sebagai penyebab kekurangan-kekurangan dalam tubuh AD sendiri.”

Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang meluas antara korps perwira, dan ini membangkitkan kembali kecendrungan mereka untuk melakukan intervensi politik atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dari awal AD menolak asas supremasi pemerintahan sipil terutama kendali dalam urusan militer, menurut Mc Vey (1971:131) dalam Nasution (2009: 281). Karena kurangnya penghargaan AD terhadap sistem parlementer yang mereka anggap sebagai hasil pemikiran Liberal-Demokrasi yang hanya dimengerti oleh orang-orang elite sipil yang berpendidikan Belanda dan sesudah revolusi mereka mengetahui bahwa pemerintahan parlementer tidak akan memberi kesempatan untuk membebaskan AD dari pengawasan sipil, menurut Mc Vey (1971:132) dalam Nasution (2009: 282).

Dengan sistem multipartai ini AD mulai tidak senang, tetapi AD sendiri pada waktu itu masih mengalami kebingungan di dalam tubuhnya yaitu jiwa dan pikirannya masih membelah dua, pendiriannya belum ditentukan kearah mana akan dikembangkan pertumbuhan dan fungsinya. Sementara itu sistem pemerintahan parlementer tidak mampu membuktikan tumbuhnya stabilitas politik. Ketidak stabilan politik dibuktikan dengan jatuh bangunya kabinet-kabinet dalam waktu amat pendek. Sistem parlementer yang tidak di topang oleh sebuah partai yang menguasai suara mayoritas (mayoritas tunggal) atau sebuah koalisi yang kuat dari partai-partai pemegang suara mayoritas sehingga menghasilkan pemerintah yang tidak stabil. Keraguan tentara terhadap sistem parlementer semakin lama semakin membesar sehingga mereka mulai melakukan pencarian alternatif.

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Didalam sistem parlementer ini, kekuasaan politik dan pembuat keputusan adalah partai politik saja. Presiden dan kaum militer merupakan kekuatan politik yang sifatnya ekstra parlementer dengan kekuasaannya yang terbatas (muhammad 1982;68). Personal dan kebijaksanaan eksekutif kurang lebih erat hubungannya dan distribusi pendapat dan kepentingan yang diwakili dalam dewan perwakilan rakyat. Bilamana pemerintahan menjalankan suatu program yang tak mendapat dukungan dari mayoritas anggota dewan, pemerintah dapat dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pemerintah baru yang mempunyai komitmen pada program yang berbeda (Rodee et al, 1988:80).”

Di sepanjang umurnya Indonesia selalu menghadapi kesulitan serius menempatkan militer pada posisi yang sebenarnya. Selepas kemerdekaan, republik Indonesia berhasil meletakkan militer di bawah kontrol sipil secara demokratis. Tetapi pada saat yang sama militer selalu bernafsu untuk masuk ke sektor politik dan meruntuhkan kontrol sipil terhadap militer. Konon militer menuduh sipil sangat lemah dan jengkel terhadap diplomasi sipil yang bertele-tele yang membuat militer tanpa keputusan sipil mengangkat senjata untuk menghadapi agresi Belanda. Konteks inilah yang pertama kali membuat runtuh kontrol sipil terhadap militer. Bahkan cerita sukses gerilya militer (tentara rakyat) di masa-masa revolusi (1945-1950), selalu direproduksi militer untuk melegitimasi dirinya pada masa-masa sesudahnya.

“Tingkat profesionalisme suatu pekerjaan tertentu diukur lewat pelaksanaan metode, karakter, status dan standar orang-orang yang berkecimpung didalamnya. Profesi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang sempurna dalam suatu bidang terspesialisasi. Seperti halnya semua birokrasi modern lain. Militer diorganisasikan berdasarkan keahlian dan fungsi. Ia bertekad untuk melindungi dan mempertahankan integrasi dan otonomi profesionalisme militer karena ia sangat membela prinsip eksklusivitas namun begitu tentara dapat melindungi dirinya sendiri, memaksakan kehendak dan tuntutanannya dan mengancam akan menggunakan cara paling keras yang tersedia bagi negara yang bersangkutan (Perlmutter, 1984: 1 dan 436).”

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada masa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) kerjasama sipil dan militer tampak harmonis. Pada periode 1952 timbul perbedaan pandangan antara militer dan sipil pertentangan ini meruncing pada masa kabinet Wilopo yaitu dengan meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam peristiwa ini markas besar AD menempatkan satuan-satuan bersenjata di depan Istana Presiden sambil mengarahkan meriam mereka ke pintu istana dan mengirim delegasi korps perwira untuk bertemu dengan Presiden Soekarno dengan maksud mendesak supaya ia membubarkan parlemen dan mengambil alih pemerintahan parlementer serta digantikan dengan kabinet presidensial dibawah kepemimpinanya sendiri, menurut Feith (1962:258-260: Sundhaussen,1982:70-71) dalam Nasution (2009:282). Usaha militer untuk mengubah sistem pemerintahan dari pemerintahan parlementer menjadi sistem pemerintahan presidensial yang otoriter ini ternyata gagal karena presiden Soekarno menolak tuntutan mereka dan menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi diktator.

Percobaan kudeta 17 Oktober 1952 serta penyelesaian masalah 17 Oktober yang berlarut-larut dan tak kunjung diselesaikan sehingga menyebabkan suasana pro dan kontra dikalangan AD, akhirnya mereka berpendapat bahwa masa krisis harus segera diselesaikan dan di akhiri. Setelah masalah ini terkatung-katung selama 28 bulan pada tanggal 21 Juni 1955 diadakan rapat-rapat angkatan darat yang di laksanakan di Yogyakarta. Rapat ini menghasilkan Piagam Yogyakarta.

Perkembangan paska piagam Yogya mengalami babak baru dengan mundurnya Kepala Staff Angkatan Darat Bambang Sugeng pada tanggal 2 mei 1955. Mundurnya Bambang Sugeng sudah lama di tunggu-tunggu oleh beberapa perwira anti-17 Oktober

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mereka adalah Kolonel Bambang Supeno, Kolonel Zulkifli Lubis, Letkol Sapari dan Letkol Abimayu. Bahkan perwira tersebut sudah mengadakan pertemuan dengan menteri pertahanan dan Presiden untuk menurunkan Bambang Sugeng dari jabatannya semenjak bulan September 1954. Sejak awal pengangkatan Bambang Sugeng memang bersifat politis dan hanya mengandalkan dukungan dari Perdana Menteri Wilopo. Bambang Sugeng dinilai gagal dalam membina keutuhan AD dan dimata para politisi sipil tidak mempunyai wibawa sehingga mudah dilangkahi wewenangnya oleh Menteri Pertahanan. Ia juga tidak mampu melaksanakan isi Piagam Yogya. Sebenarnya ini sudah disadari semenjak tahun 1953 ketika ia mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya untuk pertama kali. Permohonan pengunduran ini pertama kali langsung disetujui oleh pemerintah dan untuk mengisi jabatan KSAD ditunjuk pejabat sementara yaitu wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis.

Seperti yang diketahui pada waktu pengangkatan Bambang Sugeng sebagai KSAD, hanya semata-mata akibat pertentangan politik yang berkejolak saat itu. Seperti kasus mosi dari Manai Sophian pada masa Kabinet Wilopo sampai meletusnya Peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika dipilih menjadi KSAD, Bambang Sugeng adalah perwira yang netral yang tidak memihak salah satu pihak dari kelompok pro -17 Oktober maupun kontra 17 Oktober. Ternyata harapan untuk menyelesaikan masalah persatuan dalam AD ternyata tidak berhasil. Sebelum Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya, ia telah mempersiapkan sebuah mutasi besar-besaran dalam tubuh AD tetapi rencana mutasi ini ditolak oleh Iwa Kusuma Sumantri. Ada kemungkinan

penolakan rencana mutasi ini menjadi sebab utama Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya dan Kabinet mengabulkan permintaan Bambang Sugeng.

Pengunduran diri Bambang Sugeng kemudian menjadi suatu *test case* bagi kalangan politisi sipil terhadap kesediaanya untuk melepaskan campur tangannya dalam pengangkatan dan pengisian personalia pada jabatan militer yang biasa mereka dasarkan pada pertimbangan politik dan sekaligus merupakan ujian dari kalangan militer sehubungan dengan pelaksanaan Piagam Yogya.

Peristiwa 17 Oktober 1952 membawa rentetan kejadian antara lain, Kolonel Bambang Sugeng, meletakan jabatan. Sementara itu di lingkungan AD para perwira mengadakan pembicaraan untuk menentukan kriteria calon KSAD yang baru dan pemerintah juga memikirkan kriteria-kriteria sendiri untuk memilih KSAD yang baru. Pemerintah menunjuk Bambang Utoyo sebagai kepala staff AD yang baru, protes pemimpin AD sendiri terhadap pengangkatan kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 secara sepihak menyebabkan AD tidak dapat menerima keputusan pemerintah. Hal ini menimbulkan keputusan baru dalam tubuh TNI-AD maupun pemerintah. Implikasi dan peristiwa – peristiwa yang ada di dalam tubuh TNI-AD telah memberi pengaruh dalam kehidupan politik TNI AD dalam pemerintahan. Sehingga hal ini menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam PERISTIWA 27 JUNI 1955 : Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal.

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1955 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

B. Rumusan dan Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akandi angkat adalah “ Bagaimanakah Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955?”. Adapun untuk lebih memperjelas kajian dalam skripsi ini, maka rumusan masalah dikerucutkan dalam pertanyaan pertanyaan yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955?
2. Bagaimana kronologis Peristiwa 27 Juni 1955?
3. Bagaimana dampak Peristiwa 27 Juni 1955 terhadap hubungan sipil dan militer?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi yang berjudul “*Peristiwa 27 Juni 1955: kajian tentang hubungan sipil dan militer pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959)*” memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penyebab terjadinya peristiwa 27 juni 1955.
2. Untuk menjelaskan kronologis peristiwa 27 Juni 1955.
3. Untuk mengetahui dampak peristiwa 27 Juni 1955 terhadap hubungan sipil dan militer.

D. Metode Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode yang penulis gunakan metode historis yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1986:32) metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Di samping itu, metode sejarah merupakan petunjuk

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1955 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelaksanaan dan petunjuk teknik tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penulisan sejarah, yang mengandung empat langkah penting, diantaranya:

- a. *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam proses mencari sumber ini penulis mendatangi berbagai perpustakaan, dan mencari sumber-sumber melalui internet.
- b. *Kritik*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan penulis untuk melihat kelayakan isi dari sumber-sumber yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang di peroleh yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. *Interpretasi* dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini penulis mengerahkan seluruh kemampuan dalam membuat deskripsi, analisis kritis serta seleksi dari fakta-fakta tentang Peristiwa 27 Juni 1955 Kajian tentang hubungan sipil-dan militer pada masa demokrasi liberal, sehingga menghasilkan bentuk penulisan sejarah yang lengkap. Kegiatan

penafsiran ini dilakukan dengan cara menafsirkan fakta dan data dengan konsep yang telah diteliti penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Misalnya dalam kegiatan ini penulis memberikan penekanan penafsiran terhadap fakta dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut tentang metode ini akan dibahas pada BAB III dalam metodologi penelitian.

- d. *Historiografi* merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya dalam satu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata penulisan EYD yang baik dan benar.

2. Teknik Penelitian

Dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Sumber yang dapat dikumpulkan penulis hanya sumber tertulis yang merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu penulis hanya

akan melakukan teknik studi literatur ini karena disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat dilihat dari besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui dinamika hubungan sipil dan militer pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959).
2. Mengetahui dampak peristiwa 27 Juni 1955
3. Memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.
4. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang Peristiwa 27 Juni 1955.

F. Sitematika Penulisan

Sitematika penulisan dibuat dengan dua tujuan. Pertama, sebagai langkah bagi penulis untuk menyusun bab-bab yang belum terselesaikan. Kedua, untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan bagian skripsi. Untuk mendapat gambaran yang jelas dari penelitian dan penulisan skripsi ini. Sitematika penulisan akan disusun kedalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang didalamnya termuat mengenai alasan dan pentingnya penelitian mengenai “peristiwa 27 Juni 1955

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1955 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kajian tentang hubungan sipil dan militer pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959)". Pada bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kajian pustaka dari berbagai referensi yang berhubungan dengan "Peristiwa 27 Juni 1955: Kajian Tentang Hubungan Sipil dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)". Untuk mengkaji dan memahami serta menganalisis sejauh mana pembahasan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan sistematika penulisannya. Semua prosedur dalam penelitian akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV PERISTIWA 27 JUNI 1955 KAJIAN TENTANG HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959).

Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini akan di jelaskan konflik antara politisi dan militer serta keadaan TNI-AD menjelang peristiwa 27 Juni 1955. Sikap

pemerintah terhadap peristiwa 27 Juni 1955. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai dampak peristiwa 27 Juni 1955 terhadap TNI-AD dan terhadap pemerintahan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan yang merupakan jawaban dari masalah keseluruhan. Hasil terakhir ini merupakan temuan dan interpretasi dari peneliti tentang inti pembahasan.



Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1955 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu